



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 136/Bua.2/JF.04.1/12/2020
Lampiran : 1 (Satu) eksemplar
Hal : Penyampaian dokumen elektronik
usul pengangkatan PNS dalam
jabatan fungsional Arsiparis dan
jabatan fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa melalui
Penyesuaian/ Inpassing.

7 Desember 2020

Yth. Bapak/ Ibu

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1925/SEK/KP.04.6/11/2020 tanggal 27 November 2020 hal Perpanjangan Masa Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini disampaikan mengingatkan batas waktu penyerahan dokumen usulan untuk jabatan fungsional Arsiparis dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Mahkamah Agung RI dibatasi sampai dengan 30 Desember 2020, maka untuk mempercepat penyampaian dokumen usulan tersebut kiranya dapat disampaikan melalui dokumen elektronik (*e-doc*) melalui link:

No	Nama Jabatan Fungsional	Link penyampaian e-doc
1	Arsiparis	https://bit.ly/inpassing_jf_arsiparis
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	https://bit.ly/inpassing_jf_ppbj

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Kepala Biro Kepegawaian,



Supatmi

Tembusan :
Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 136/Bua.2/JF.04.1/12/2020
Tanggal : 7 Desember 2020

- Link *url* terkait bahan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Arsiparis

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/perkanri5-19
2	Surat pernyataan masih dan telah menjalankan tugas kearsipan	http://tiny.cc/anri2
3	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan Arsiparis	http://tiny.cc/anri3
4	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	http://tiny.cc/anri4

- Link *url* terkait bahan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional PPBJ

No.	Uraian	Link Terlampir
1	Peraturan	http://tiny.cc/inpassing-ppbj
2	Contoh format surat keterangan pengalaman di bidang PBJ	http://tiny.cc/sket1-ppbj-
3	Contoh format surat keterangan tidak sedang hukuman disiplin, tugas belajar dan cuti di luar tanggungan negara	http://tiny.cc/sket2-ppbj-
4	Contoh format surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	http://tiny.cc/super-ppbj-
5	Contoh Formulir mengikuti Penyesuaian / <i>Inpassing</i>	http://tiny.cc/form-jfppbj-



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1925/SEK/KP.04.6/11/2020
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Perpanjangan Masa Uji Kompetensi Penyesuaian/
Inpassing dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

27 November 2020

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional RI nomor B-PK.00.00/2291/2020 tanggal 9 November 2020 hal usulan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Arsiparis melalui penyesuaian/*inpassing* dan surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 16068/D.3/11/2020 tanggal 23 November 2020 hal perpanjangan masa uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* JF PPBJ, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meralat batas waktu penyerahan dokumen usulan untuk jabatan fungsional Arsiparis dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 398/SEK/KP.04.6/3/2020 tanggal 04 Maret 2020 hal Mekanisme/ Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya yang semula dibatasi tanggal 30 Juni 2020 diubah menjadi 30 Desember 2020.
2. Pimpinan unit kerja agar mengusulkan pegawai yang berminat dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) melalui Penyesuaian/*inpassing* yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Fungsional dari Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding.
3. Satker yang mengusulkan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing* wajib melampirkan dokumen berupa rincian peta jabatan, hasil penghitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional pada Jabatan Fungsional yang diusulkan.
4. Penyampaian dokumen usulan bagi Jabatan Fungsional Arsiparis berupa *hard copy* sedangkan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berupa *soft copy* disertai dengan pencantuman link *url* pada *Google Drive* dan *hard copy*.
5. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing* tidak diperkenankan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional dan guna tertibnya administrasi dihimbau kepada pimpinan unit kerja agar tidak merekomendasikan promosi terlebih dahulu ke dalam Jabatan Struktural minimal selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional.
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengenai Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional PPBJ ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pembina, sebagaimana terlampir.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/*inpassing* dapat menghubungi nomor telepon 021-384 3348 dengan ext. 422, 734, 735.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pr. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Dr. Drs. H. Ach. Nur, S.H., M.H.

